

BE-HISZ Journal

Journal of Economics and Accounting

VOL. 2 No. 1 2025

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BALEE UJONG RIMBA PADA KANTOR CAMAT MUTIARA TIMUR KABUPATEN PIDIE

Zulkifli Umar, Irmawati, Nadia Zakia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Budi Safatul Anam, Zulkifli Umar, Yusnadi

ANALISIS FAKTOR DOMINAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KEUANGAN POLDA ACEH

Aliamin, Hendri Mauliansyah, Rachmad Fadhli

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN BIAYA PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN ACEH

Cut Israeta, Syamsidar, Fitri Yunina

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR LAPAS KELAS II-A BANDA ACEH

Zulkifli Umar, Yusliana, Fahril Ulya



ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR LAPAS KELAS II-A BANDA ACEH

Zulkifli Umar¹; Yusliana², Fahril Ulya³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Aceh

zulkifli.umar@unmuha.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out the realization of the budget at the Class II A Prison Office in Banda Aceh in 2016-2018. This study uses a qualitative descriptive method. Data collection is carried out by means of library research and field research. The object of this research is the Class II A Prison Office in Banda Aceh. Based on the results of the study, it is known that: (1) The realization of the budget of the Class II A Prison Office of Banda Aceh based on the analysis of the effectiveness ratio of the Fiscal Year 2016-2018 in the Effective category with an effectiveness value of 97.18% in 2016, 99.91% in 2017, and 99.63% in 2018, and (2) The realization of the budget of the Class II A Prison Office in Banda Aceh based on the analysis of the efficiency ratio of the Fiscal Year 2016-2018 in the Inefficient category with a value of efficiency of 102.90% in 2016, 100.09% in 2017, and 100.37% in 2018

Keywords: effectiveness, efficiency, and budget

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitian ini adalah Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efektivitas Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Efektif dengan nilai efektivitas sebesar 97,18% pada tahun 2016, sebesar 99,91% pada tahun 2017, dan sebesar 99,63% pada tahun 2018, dan (2) Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efisiensi Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Tidak Efisien dengan nilai efisiensi sebesar 102,90% pada tahun 2016, sebesar 100,09% pada tahun 2017, dan sebesar 100,37% pada tahun 2018

Kata Kunci : efektivitas, efisiensi, dan anggaran belanja

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik. Dalam menyusun anggaran yang akan digunakan dalam suatu kegiatan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan (UPT) dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh dengan dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh merupakan salah satu instansi yang bergerak dalam pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terdapat juga salah satu anggaran yang tertuju pada bidang Pembinaan Kemandirian untuk pembiayaan Narapidana khususnya yaitu anggaran Pembinaan Kemandirian, yaitu bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangnya lagi. Dengan adanya anggaran Bimbingan Kerja (BimKer) di harapkan para tahanan mendapatkan pelatihan dan keterampilan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sehingga mempunyai bekal saat masa tahanan sudah habis serta dapat diterima di masyarakat lagi.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan (Budi et all, 2025). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi,

efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab. Sehingga nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakatlah yang dapat menilai berhasil tidaknya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang dipublikasikan pemerintah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Jika dibandingkan dengan neraca (LRA) menduduki priotas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi dan distribusi. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang dinilai paling utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemerintah atas sumber yang dipercayakan (syamsidar et all, 2024). Pengelolaan keuangan Pemerintah harus memenuhi *value for money* serta partisipasi dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan akuntanbilitas dan transparansi pengeluaran daerah, maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waku dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Anggaran

2.1.1. Pengertian Anggaran

Munandar (2014:3) mendefenisikan anggaran (*budget*) sebagai rencana yang disusun secara sistimatis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Menurut Mauliansyah (2017:9) anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Rudianto (2014:3) menjelaskan bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang mewujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistimatis. Sedangkan menurut *Government Standart Accounting Board* (GSAB) (dalam Bastian 2015:64) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang dioperasikan oleh suatu lembaga dalam mengelola anggaran yang terdiri dari sejumlah target yang ingin dicapai, dalam melaksanakan program serta kegiatan dalam jangka waktu tertentu dan upaya memenuhi kebutuhan didalam kelembagaan.

2.1.2 Fungsi Anggaran

Menurut Rudianto (2014:5) fungsi anggaran meliputi dari beberapa hal, yaitu: (1) Perencanaan (*planing*) Anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak yang diupayakan untuk direalisasikan, memberi saran dan arah yang harus dicapai oleh bagian organisasi di dalam suatu periode waktu tertentu. (2) Pengorganisasian (*organizing*). Setelah semua rencana ditetapkan, maka perusahaan mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan. (3) Menggerakkan (*actuating*). Setiap sumber daya yang ada harus diarahkan, dikoordinasikan satu dengan yang lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. (4) Pengendalian (*controlling*). Anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak. Menurut Nordiawan (2011:70) anggaran mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai : (1) Alat Perencanaan (*planing tool*). (2) Alat Pengendalian (*control tool*). (3) Alat Kebijaksanaan. (4). Alat Politik (*political tool*). (5) Alat koordinasi dan Komunikasi (*coordination and communication tool*). (6) Alat Penilaian Kerja (*performace measurement tool*). (7). Alat Motivasi (*motivation tool*). Menurut

Bastian (2015:80) fungsi anggaran sektor publik meliputi (1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. (2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. (3) Anggaran sebagai alat komunikasi intern, yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar komunikasi atasan dengan bawahan. (4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. (5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. (6) Anggaran merupakan instrument publik. (7) Anggaran merupakan instrument kebijakan fiscal. Salah satu tujuan penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2012:68) untuk membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah serta menciptakan efisiensi serta meningkatkan transparansi dan pertanggung-jawaban kepada DPR-RI/DPRD dan masyarakat luas.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji indikator atau variabel yang dominan dalam membentuk konstruk yang diteliti.

3.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa opini dan informasi dari responden yang diperoleh dengan memberikan kuesioner, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh, yang berlokasi di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Objek dari penelitian ini yaitu informasi realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018.

3.4 teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*field research*) dengan cara meneliti secara langsung ke Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh untuk memperoleh informasi data anggaran

yang dapat melengkapi penyusunan skripsi ini untuk mengumpulkan data lapangan digunakan instrument dalam observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait laporan realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh.

3.5 teknis analisis data

- 1) Untuk mengetahui realisasi anggaran pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang kedudukan, fungsi dan problematika realisasi anggaran pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh. Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini maka penulis menggunakan analisis rasio efektivitas dan efisiensi.

- 2) Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja, (Munawir, 2013:168) yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

- 3) Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

- 4) Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja (Halim, 2012:41):

$$\frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Efektivitas Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

Dari hasil pengamatan pada laporan anggaran dan realisasi Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2016-2018, maka efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, berada pada kategori Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh mengalami kestabilan kinerja terkait dalam hal belanja. Menurut Ihyaul (2015:26) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*pending wisely*). Agar dapat memperbaiki kinerja dalam hal ini terkait belanja, Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh sebaiknya mengevaluasi kembali apa yang menjadi keperluan untuk belanja serta menetapkan

anggaran belanja sesuai dengan keperluan. Dengan demikian, pelaksanaan pengeluaran menjadi lebih efektif.

4.2. Efisiensi Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh
Dari hasil pengamatan pada laporan anggaran dan realisasi belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh pada tahun anggaran 2015-2017, maka efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh tahun anggaran 2016-2018, selama tiga tahun berada pada kategori Tidak Efisien. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan pemborosan anggaran. Nordiawan dan Ayuningtiyas (2014:161) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*) Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh harus mampu menekan biaya serendah mungkin agar meningkatkan kinerja, sehingga tingkat efisiensi belanja menjadi lebih efisien.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa; (1) Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efektivitas Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Efektif dengan nilai efektivitas sebesar 97,18% pada tahun 2016, sebesar 99,91% pada tahun 2017, dan sebesar 99,63% pada tahun 2018. (2) Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efisiensi Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Tidak Efisien dengan nilai efisiensi sebesar 102,90% pada tahun 2016, sebesar 100,09% pada tahun 2017, dan sebesar 100,37% pada tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries, Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Basariyah, Siti. (2017). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

- Pemerintah Desa (BPMD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 5 (6), 63-74.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Budi, B., Umar, Z., Mauliansyah, H., & Rahman, A. (2025). *Pendampingan Pengelolaan Keuangan BUMG Berbasis Komputer Dan Sak-Etap Di Punge Blang Cut Kota Banda Aceh*. JKA, 2(1).
- Darise, Nurlan. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Ihyauly, Ulum. (2015). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Julita. (2014). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Kerlinger, FN. (2000). *Asas-asas penelitian behavior*. Terjemahan Landung R Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahmudi. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marbun, dkk. (2014). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Media Pustaka.
- Mauliansyah, H. (2017). *Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran. Besaran Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan Perubahan Anggaran terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara)*(Doctoral dissertation, Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh).

- Miles, M. B, dan Huberman, A. M. (2012).
- Munandar, A. S. (2014). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: UI Press.
- Munawir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Dedi. (2011). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pangkey, Imanuel. (2015). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3 (4), 33-43.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Robbins, Stephen P & Coulter, Mary. (2015). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Rudianto. (2014). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo.
- Sari, Dwi Novita, Sri Minarti dan Salmah Pattisahusiwa. (2018). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal KINERJA*, 15, (1), 38-45.
- Sekaran, & Bougie. (2013). *Research Methods for Business: A skill Building Approach*. New York: John wiley Sons.
- Syamsidar, S., Sari, D. P., Mauliansyah, H., & Maisura, N. (2024). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 1(1), 19-38.
- Untari, Rusita. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2011-2014. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.